



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENINJAUAN PEMBANGUNAN BATALYON TERITORIAL 838

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandant@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau pembangunan dan kesiapan operasional Batalyon 838/Purwa Wijaya di Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Juli 2025. Batalyon ini berdiri di lahan seluas 318,8 hektar di wilayah pesisir selatan Cilacap.

Kunjungan Menhan RI ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dalam memastikan kesiapan satuan-satuan TNI dalam mendukung kebijakan Perisai Trisula Nusantara, yaitu kebijakan sistem pertahanan yang mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan ini, turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Kabaranahan Kemhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Mohammad Andhy Kusuma, Danrem 071/Wijayakusuma Brigjen TNI Jamaluddin, S.I.P., M.I.P., Danbrigif-4/DR Kolonel Inf Charlie Clay Lorando Sondakh, S.E., serta beberapa pejabat Kemhan dan para Asisten Kasdam IV/Diponegoro.

Menhan RI menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk memeriksa kesiapan fasilitas Batalyon 838/Purwa Wijaya di Kabupaten Cilacap yang akan menjadi salah satu motor pembangunan dan pertahanan daerah. Menhan RI memeriksa pembangunan sarana dan prasarana markas Batalyon 838/Purwa Wijaya. Tidak hanya fasilitas saja, Menhan RI juga memeriksa kondisi personel yang bertugas di sana.

Menhan RI juga hadir untuk memberikan motivasi serta mengingatkan kepada seluruh prajurit agar memiliki jiwa kekompakan dan melakukan pengabdian yang terbaik kepada rakyat. Menhan RI berharap bahwa dengan kehadirannya, para pasukan dapat lebih semangat menjalankan tugas besar yakni pertahanan teritorial dan memperkuat pembangunan, serta mengingatkan bahwa TNI bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan bangsa.

Menhan RI juga menjelaskan bahwa wilayah yang menjadi tempat beradanya Batalyon 838/Purwa Wijaya tengah bertransformasi menjadi pusat kekuatan teritorial yang strategis bagi pertahanan negara. Menhan RI selanjutnya menyampaikan bahwa untuk menunjang tugas di bidang pertahanan dan pembangunan, batalyon ini akan dilengkapi dengan kompi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Mereka akan bertugas membantu masyarakat mendapatkan sumber pangan ataupun pencaharian yang layak demi terciptanya ketahanan pangan dan ekonomi di daerah. Dengan demikian, keberadaan Batalyon 838 di Adipala Cilacap diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan teritorial, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan wilayah perbatasan serta kawasan pesisir selatan Jawa.

Menhan RI melanjutkan dirinya tidak memungkiri bahwa nantinya prajurit akan menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugas baru di bidang pembangunan dan ketahanan pangan. Karena itu, Menhan RI menekankan prajurit harus mengedepankan kerja sama dan kekompakan dalam menjalankan tugas mulia ini, yang mana kebersamaan, kekompakan, dan ketulusan dalam mengabdikan kepada rakyat adalah kunci kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI mengapresiasi peran Batalyon Teritorial 838 dalam membantu pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, dengan memahami bahwa tantangan yang dihadapi NKRI tidak hanya bersifat ketahanan kedaulatan, namun juga terdapat tantangan lain yang sangat serius dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, yakni tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional, dan salah satunya adalah ketahanan pangan.

Namun demikian, Komisi I DPR RI perlu mengingatkan kepada Menhan RI agar pelaksanaan tugas Batalyon Teritorial harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, agar terjadi sinkronisasi kegiatan penguatan ketahanan pangan dengan saling menguatkan. Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan kepada Menhan RI agar kegiatan Batalyon Teritorial dalam memperkuat ketahanan pangan tidak mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan RI. Selain itu, TNI harus selalu diingatkan untuk menempatkan Kementerian Pertanian sebagai *leading sector* dalam menangani masalah pangan, sehingga tidak akan terjadi dualisme kebijakan ketahanan pangan.

Sumber

antaranews.com, 11 Juli 2025;
indonesiadefence.com, 11 Juli 2025;
kemhan.go.id, 10 Juli 2025; dan
topikindonesia.id, 12 Juli 2025.

Minggu ke-2 Juli
(7 s.d. 13 Juli 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*